



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-290/PB/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Persiapan Pelaksanaan *Roll Out* SAKTI Tahun 2021

22 November 2021

- Yth. 1. Para Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian;
2. Para Wakil Kepala Badan;
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Agung RI;
4. Wakil Kepala Kepolisian RI; dan
5. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet RI
(terlampir).

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya Nomor S-51/PB/2021 tanggal 22 Februari 2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021, disampaikan sebagai berikut:

1. Penerapan SAKTI meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L), melalui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada SAKTI, perekaman transaksi yang sama cukup dilakukan satu kali pada satu modul untuk kemudian digunakan oleh modul lain yang terkait. Dengan demikian, potensi kesalahan yang muncul dari perekaman transaksi yang sama secara berulang (redundansi) tidak terjadi.
 - b. SAKTI diakses melalui *web browser* sehingga tidak membutuhkan proses instalasi/pemutakhiran aplikasi pada sisi pengguna. Selain itu, konsolidasi data secara berjenjang juga dilakukan lebih cepat karena seluruh pengguna pada seluruh level (Satker, Kanwil, Eselon I, K/L) mengakses satu basis data yang terintegrasi.
 - c. SAKTI menerapkan pengaturan kewenangan pengguna berdasarkan peran (operator, validator, dan *approver*), pendokumentasian perubahan data pada setiap tahapan transaksi (*audit trail*), dan kemampuan untuk melakukan penelusuran jurnal akuntansi ke transaksi sumbernya (monitoring jurnal).
 - d. SAKTI menggunakan akuntansi *full accrual* dengan proses validasi dan penjurnalan secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan (*error*) dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Sebagai persiapan pelaksanaan *roll out* SAKTI, Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPb telah melaksanakan antara lain:
 - a. Penambahan *bandwith* internet pada unit vertikal DJPb (Kanwil DJPb dan KPPN) yang dapat digunakan oleh Satker K/L yang mengalami kendala koneksi internet untuk mengakses SAKTI.
 - b. Kerjasama penyediaan 751 titik akses internet bagi satker di daerah terpencil (*remote area*) dengan BLU BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 - c. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mengomunikasikan rencana penerapan sekaligus pengenalan SAKTI dalam bentuk FDG/Sosialisasi/*Workshop* untuk tingkat pimpinan dan tingkat operasional lingkup Kantor Pusat maupun Satker K/L.
 - d. Penyiapan SDM pada Kanwil DJPb/KPPN yang dibekali pengetahuan dan ketrampilan dalam operasionalisasi SAKTI untuk memberikan pelatihan/bimtek dan layanan konsultasi mengenai SAKTI kepada Satker K/L.

- e. Kerjasama penyediaan dan layanan email kedinasan SAKTI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 - f. Penyediaan server pelatihan (<https://pandu-sakti.kemenkeu.go.id>) untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi (pelatihan/bimtek) yang disertai dengan praktik penggunaan aplikasi.
 - g. Penyelenggaraan *End User Training* (EUT) oleh seluruh KPPN kepada Satker mitra kerja pada 16 Agustus s.d. 1 Oktober 2021 dan 18 Oktober s.d. 7 November 2021 menggunakan server pelatihan pada huruf f.
 - h. Penyediaan media pembelajaran secara mandiri berupa:
 - 1) petunjuk teknis (juknis) penggunaan SAKTI yang dapat diperoleh melalui aplikasi mobile PanduSAKTI yang tersedia dalam versi android dan IOS; dan
 - 2) video tutorial penggunaan SAKTI yang dapat diakses melalui aplikasi mobile PanduSAKTI maupun kanal youtube SAKTI (<https://www.youtube.com/c/SAKTI>).
 - i. Dukungan layanan *help desk* SAKTI melalui HAI DJPb dan petugas layanan pelanggan HAI-CSO pada Kanwil DJPb dan KPPN.
3. Selanjutnya, demi kelancaran penerapan SAKTI di masing-masing K/L, diminta bantuan dan kerja samanya untuk:
- a. menyiapkan koneksi internet yang memadai untuk kebutuhan operasionalisasi pengelolaan keuangan melalui SAKTI pada seluruh Satker lingkup masing-masing K/L; dan
 - b. mengimbau Satker lingkup masing-masing K/L untuk menjalin komunikasi/koordinasi dengan Kanwil DJPb dan KPPN setempat terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka *roll out* SAKTI, khususnya pelaksanaan transaksi awal yakni penyampaian SPM gaji induk/penghasilan pegawai bulan Januari tahun 2022 yang dihasilkan dari SAKTI mulai akhir tahun 2021.
4. Mengingat waktu pelaksanaan *roll out* SAKTI yang tidak terlalu lama, kami mengharapkan komitmen dan dukungan segenap pimpinan K/L terhadap keberhasilan *roll out* SAKTI tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
7. Direktur Jenderal Pajak;



8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko;
10. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
11. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
12. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
13. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi;
14. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi;
15. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
17. Para Direktur Lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
18. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
19. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Yth:

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
4. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
22. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
23. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
30. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
31. Sekretaris Utama Dewan Ketahanan Nasional
32. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN



34. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
35. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
36. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
37. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
38. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
39. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
40. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
41. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
42. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
43. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
44. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
45. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
46. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
47. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
48. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
49. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
50. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
51. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
52. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
53. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
54. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
55. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
56. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
57. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
58. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olah Raga
59. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
60. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
61. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
62. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
63. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
64. Sekretaris Utama Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
65. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
66. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
67. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
68. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
69. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet RI

70. Sekretaris Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum
71. Sekretaris Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
72. Sekretaris Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
73. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang
74. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
75. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
76. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila